

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
(STUDI DI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)

USULAN PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DEVI RAHAYU SARI

NPM : 167310440

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Sholawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan islam. Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan usulan penelitian dengan judul: "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Program Kampung Iklim (Studi Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir)" sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenaan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spiritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau.

4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen-dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Kepala Tata Usaha dan seluruh staf-staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada Ibu dan Ayah tercinta serta keluarga atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan melimpahkan kasih sayang tiada henti.
8. Terimakasih kepada teman- temanku tersayang yang sudah meluangkan waktu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini terutama pada sahabatku Danna Aulidan,S.Pd , Rezki Harshi Alabrari , Sagopi Ria Apriliani Junaiansen,S.Pd, Alisa Maharani pertiwi,Afni farasti, Desi Putri Purwanti,Febby Hesti dan teman-teman kelas IP F 2016.
9. Kepada Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Kecamatan Balai Jaya yang telah membantu penulis menyelesaikan dalam penulisan

usulan penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari ALLAH SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin Ya Allah.

Pekanbaru, 14 Januari 2021

Devi Rahayu Sari
167310440

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Teori Pemerintahan.....	10
2. Teori Kebijakan.....	12
3. Teori Evaluasi.....	15
4. Evaluasi Kebijakan Publik.....	21
5. Program Kampung Iklim menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/ 2016 tentang Program Kampung Iklim.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Konsep Operasional.....	31
E. Operasional Variabel.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan dan Key Informan	35
D. Teknik Penarikan Informan	36
E. Jenis dan Sumber Data	36
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	41
A. Sejarah Singkat Kecamatan Balai Jaya	41
B. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Balai Jaya	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Identitas Informan	46
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	49
1. Indikator Upaya Adaptasi	49
2. Indikator Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	57
3. Indikator Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan	64
C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya	68
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
Tabel I. I	Data Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya Kabupaten.....	3
Tabel II. I	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel II. II	Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi Kegiatan Pencegahan Dampak Perubahan Iklim Kecamatan Balai Jaya.....	32
Tabel III. I	Anggota yang menjadi informan di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....	36
Tabel IV. I	Jumlah Penduduk Kecamatan Balai Jaya.....	43
Tabel IV. II	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Balai Jaya.....	43
Tabel IV. III	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Balai Jaya.....	44
Tabel IV. IV	Sarana dan Prasarana Kecamatan Balai Jaya.....	44
Tabel V. I	Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	46
Tabel V. II	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel V. III	Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	48
Tabel V. IV	Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	48

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar II. I Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan	30
Gambar IV. I Struktur Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	45



**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
(STUDI DI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)**

ABSTRAK

DEVI RAHAYU SARI

167310440

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dari adanya dampak perubahan iklim yang alami dan campur tangan manusia, sebagai upaya untuk mengurangi dampak tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim yang termasuk kedalam tata laksana program kampung iklim yang meliputi upaya adaptasi perubahan iklim, upaya mitigasi perubahan iklim, dan kelembagaan dan dukungan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian ini dilakukan kurang lebih lima bulan. Sumber data penelitian ini dalah informan sebanyak enam orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan optimal. Tetapi, adapun kendala dalam menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah banyaknya dana anggaran mandiri yang harus disediakan untuk pelaksanaan program kampung iklim dan kesadaran atau partisipasi masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program kampung iklim.

Kata Kunci : *Evaluasi dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim*

EVALUATION IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY NUMBER P.84 / MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11/2016 CONCERNING CLIMATE VILLAGE PROGRAMS (STUDY IN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR)

ABSTRACT
DEVI RAHAYU SARI
167310440

This research is motivated by the impact of natural climate change and human intervention, as an effort to reduce this impact the government issued a Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.84 / MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11/2016 concerning the Village Program. Climate is included in the management of the climate village program which includes climate change adaptation efforts, climate change mitigation efforts, and sustainable institutions and support. The research method used in this research is a qualitative method. The duration of this research was approximately five months. The data source of this research is six informants. Data collection used was observation, interview and documentation. Data analysis techniques in this study consisted of the stages of data collection, data reduction, data presentation, verification and confirmation of conclusions. Based on the results of the discussion research, the evaluation of the implementation of Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.84 / MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11/2016 concerning the Climate Village Program in Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency has been running optimally. However, there are obstacles in carrying out the Evaluation of the Implementation of Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.84 MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11/2016 concerning the Climate Village Program in Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency, is the large amount of independent budget funds that must be provided for implementation. climate village program and community awareness or participation as well as a lack of community understanding of the climate village program.

Keywords: Evaluation and Implementation of Minister of Environment Regulation and Forestry Number P.84 MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11/2016 concerning Climate Village Program



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati oleh manusia dan mempengaruhi kehidupannya. Manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya pasti saling membutuhkan satu sama lain baik itu sesama manusia, manusia dengan tumbuhan dan hewan, serta manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu siklus lingkungan hidup yang baik harus tetap terjaga dengan baik.

Namun tidak bisa dipungkiri oleh setiap manusia yang ada di bumi ini, masalah lingkungan hidup di muka bumi ini pasti akan selalu ada seperti polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam, rekayasa genatika.

Dari banyak masalah lingkungan hidup yang disebutkan diatas perubahan iklim adalah salah satunya dalam masalah lingkungan hidup. Perubahan iklim secara umum diartikan sebagai kondisi dimana iklim yang ada di bumi ini sedang mengalami proses perubahan temperatur udara yang semakin lama akan menjadi semakin panas, berubahnya periode hujan, seringnya terjadi badai. Sebenarnya perubahan iklim ini merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami, tetapi saat ini ternyata perubahan iklim terjadi karena adanya campur tangan dari manusia.

Sehingga perubahan iklim ini terjadi lebih cepat dan bukan lagi menjadi fenomena alam yang alami. Apabila perubahan iklim yang diakibatkan dari campur tangan manusia ini berlebihan dapat mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, Salah satu dampak dari perubahan iklim yang secara ekstrim adalah kebakaran hutan.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dari tahun ketahun semakin meluas dan bertambah. Tahun 2010, Provinsi Riau pernah mengalami penurunan luas kebakaran hutan dan lahan, namun pada tahun 2011 hingga saat ini mengalami peningkatan yang relatif tinggi. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2013 menjadi yang terbesar dalam taksiran statistika Kementerian Kehutanan RI tahun 2008 hingga 2013. Tahun 2013 Provinsi Riau sebagai penyumbang titik panas (*hotspot*) terbesar dari 32 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut setara panas kedua setelah permukaan bumi kenaikan total ozon tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Kajian mengenai pengaruh iklim terhadap waktu kejadian kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan. Strategi mitigasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim dan waktu kejadian kebakaran hutan merupakan salah satu aspek yang harus menjadi rencana strategi untuk menyikapi perubahan iklim, kemudian untuk menyikapi perubahan iklim tersebut Pemerintah RI sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P. 84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/112016 tentang program kampung iklim. Program

Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Salah satu wilayah yang pernah mengalami dampak dari perubahan iklim yang ekstrim sehingga mengakibatkan kebakaran hutan adalah Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengatasi hal tersebut salah satu strategi atau upaya pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berikut disajikan data Program ProkLim di Kecamatan Balai Jaya.

Tabel I. I Data Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 2019

No.	Desa/Kelurahan	Kategori Proklim	Jumlah Pondok
1	Kelurahan Balai Jaya	ProKlim Utama	1
2	Desa Balam Jaya	Proklim Lestari	5

Sumber: Hasil Observasi Awal Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel Data Program Kampung Iklim Desa/Kelurahan di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir diatas dapat dilihat desa/kelurahan yang melaksanakan Program Kampung Iklim. Untuk kelurahan Balai Jaya ada satu yaitu pondok kayangan dan desa Balam

Jaya ada lima pondok diantaranya pondok Iman, pondok idaman,pondok 2 cibaliung, pondok 3 cibaliung dan pondok idola.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Proklim) memberikan penghargaan terhadap masyarakat pada lokasi setingkat Kelurahan/Desa yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya adaptasi dan migitasi perubahan iklim. Keberadaan kelompok masyarakat dan tokoh lokal penggerak adaptasi dan migitasi perubahan iklim, serta tersedianya instrumen pendukung merupakan faktor penting dalam penilaian usulan Program Kampung Iklim (Proklim). Proklim diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan perubahan iklim dan dampaknya, sehingga terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang tahan akan risiko berubahnya iklim serta rendah emisi karbon yang disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, pemahaman dan kapasitas masyarakat diwilayah setempat. Beragam kegiatan masyarakat penerima penghargaan program iklim menunjukkan bahwa aksi adaptasi dan migitasi perubahan iklim bukan sesuatu hal yang baru dan sulit untuk dilakukan. Inovasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan untuk menjawab tantangan masyarakat dengan adanya isu perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian

masyarakat internasional, termasuk Indonesia dan provinsi Riau khususnya. Proses perubahan iklim berjalan semakin meluas berdampak pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di seluruh belahan bumi ini.

Program Kampung Iklim di Kepenghulu Balai Jaya dimulai pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan Tropi ProKlim Nasional. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program kampung iklim adalah menggunakan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah. Program Kampung iklim dilaksanakan dibawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Untuk kegiatan pendanaan masyarakat memiliki sistem pendanaan mandiri untuk kegiatan mitigasi/adaptasi perubahan iklim, misalnya dari usaha bersama atau iuran anggota. Sedangkan pendanaan yang didapat dari Pemerintah hanya untuk pendanaan pembinaan dan penilaian saja.

Adapun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Program Kampung Iklim Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan yang dimaksud dengan:

1. Program kampung iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta

memberikan pemangkuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada diwilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

Dalam Pasal 10 Kategori ProKlim menyebutkan bahwa:

- (1) Kategori ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), terdiri dari:
 - a. ProKlim Pratama;
 - b. ProKlim Madya;
 - c. Nominasi ProKlim Utama;
 - d. Nominasi ProKlim Lestari.
- (2) Kategori ProKlim ditetapkan berdasarkan nilai akhir ProKlim, yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan berkelanjutan.
- (3) ProKlim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) ProKlim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir ProKlim antara 51-

80 % (lima puluh sampai dengan delapan puluh persen).

(5) Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir ProKlim diatas 81% (delapan puluh persen).

(6) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagaimana Nominasi ProKlim Utama.

Kategori ProKlim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah termasuk dalam kategori proklam utama dan lestari dinilai dan diverifikasi langsung oleh tim penilai provinsi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka ditemukan beberapa gejala atau fenomena yaitu:

1. Teridentifikasi kurang efektifnya pembinaan dari kepala pemerintah kecamatan selaku penanggung jawab Program Kampung Iklim sehingga dalam pelaksanaan operasional dan pembinaan program kampung iklim kurang berjalan dengan maksimal.
2. Banyaknya desa/kelurahan yang menolak melaksanakan Program Kampung Iklim.
3. Terindikasi kurangnya bantuan Anggaran/pendanaan dari pemerintah pusat ke kecamatan untuk Program Kampung Iklim.

Dari Fenomena diatas dapat diketahui penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program kampung iklim. Perhatian dan

pembinaan yang kurang dari kepala pemerintah kecamatan, kurangnya partisipasi dan kurangnya anggaran sangat mempengaruhi berjalannya program kampung iklim. Dengan demikian perlu adanya evaluasi atau penilaian agar program kampung iklim dapat berjalan dengan maksimal dalam menciptakan masyarakat yang memahami permasalahan perubahan iklim dan dampaknya. Kemudian, masyarakat dapat melakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, maka karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim (Studi di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok bahasan peneliti adalah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim (studi di Kecamatan Balai Jaya). Untuk membahas penelitian lebih lanjut, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan

Hilir?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kegunaan Penelitian adalah :
 - a. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan yang diperoleh di Fakultas Sosial Politik.
 - b. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya bagi peneliti yang membahas Pelaksanaan Program Kampung Iklim.
 - c. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun menjadi perbandingan bagi peneliti yang membahas

Pelaksanakan Program Kampung Iklim.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintahan” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi “pemerintahan” dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti ataupun ikhwal pemerintahan sendiri (Inu Kencana Syafiiie 2011:4).

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan sipil, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan pemerintah itu disebut pemerintahan.

Lebih lanjut Ndraha (2003:6) megartikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang brsangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tunututan/harapan/keinginan yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat,

yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan (Public Service), pembangunan (Defelopment), pemberdayaan (Empowering), pengaturan (Regulation). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihat lah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan kualitas pemerintah itu sendiri menurut Rasyid (dalam Labolo,2007: 22).

Pemerintah sesuai dengan karakteristik struktural sebagai pemegang otoritas formal harus mampu bertindak netral dalam konflikitas keperntingan. Fungsi yang dijalankan pemerintahan sebagai pemerdaya masyarakat harus benar-benar diatas civic society yang sedang membangun diri (Moeljarto,2001;77).

Selanjutnya Ndaraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh orang bersangkutan pada saat dibutuhkan,”jadi normative,idea, das sollen”) dan kedua dari sudut bagaimana kenyataannya (“pada saat dibutuhkan

oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein).

Menurut Ndraha (2003;5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa pelayanan publik dan sipil.

Ndaraha (2003;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang terdiri dari :

1. Yang di perintahkan
2. Tuntutan yang di perintah (jasa public dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintah
6. Pemerintah yang bagaimana yang di anggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimnana membentuk pemerintahan yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman dimasa akan datang.

2. Teori Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan

“kebijaksanaan” kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain.

Menurut Purwo Santoso (2004;5) menyatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Raksataya (dalam Lubis,2007;7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Ada tiga unsur dalam kebijakan, yakni :

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
2. Strategi unntuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan strategi)
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaanya.

Easton (dalam Lubis,2007;8) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh kepentingan masyarakat ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain.

Menurut Hanim (2004;10) mengatakan bahwa instrumen

penelitian dapat dikembangkan dari indikator yang berisikan pertanyaan yang atau intern yang akan diteliti untuk mengatur indikator, dimensi, sampai kepada variable. Instrumen dapat berupa kuisisioner, daftar pedoman wawancara dan daftar pedoman observasi. Namun satu instrumen yang baik harus diuji coba dahulu dilapangan sehingga instrumen tersebut memenuhi validitas (mempunyai kemampuan yang baik untuk mengukur objek yang diukurnya) dan realibilitas (tingkat kepercayaan).

Selanjutnya Nogi (2003;3) menjelaskan pembutan kebijakan yang baik dapat dilakukan dengan cara :

1. Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat
2. Kebijakan harus memiliki alternative pemecahan masalah
3. Kebijakan harus memiliki kebijakan yang jelas
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pertama dikenal dengan istilah analisa kebijakan, dan kedua dikenal dengan kebijakan publik politik oleh Hughes (dalam subarsono, 2009;5) kebijakan publik ini dijelaskan pada dua pendekatan, yaiitu:

1. Studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih.
2. Lebih menekankan pada hasil dari kebijakan publik daripada penggunaan model statistik, dengan melihat interaksi politik

sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lingkungan.

Makna dari proses kebijakan publik dijelaskan oleh subarsono (2009;2) sebagai berikut:

Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam subarsono, 2009;2) adalah apapun pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Maeshall (dalam Suharto 2008;10) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Awang (2010;26) menjelaskan bahwa pada intinya ada tiga

prinsip kebijakan yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan, yaitu *formulation, implementation, dan evaluation*.

3. Teori Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang di capai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang di harapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang di evaluasi ataupun oleh pihak lain dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat tidak beraturan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat untuk mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Duun (2003;608) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program, sedangkan secara umum diartikan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informan mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Ndraha (2003;201), evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara perbandingan antara standar dan fakta dan analisis hasilnya. Ada beberapa model evaluasi diantaranya adalah *before-after* (sebelum dan sesudah) yaitu perbandingan anantara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan teatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *before* (sebelum).

Subarsono (2009;119) bahwa, evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan datang dimasa yang akan datang supaya lebih baik.

Saydam (2000;119) berpendapat evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dan mengmbil sebuah keputusan.

Menurut Suhartono (2008;80) bahwa, evaluasi dilakukan terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan, maksudnya adalah;

Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yng telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, mampu mengurangi atau mengatasi masalah, berdasarkan evaluasi ini, dirumuskan kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Menurut Subarsono (2009;120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan sikap kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Jenis pendekatan terhadap evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
- b. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
- c. Evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat di percaya, dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 301) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan Siagian (2006: 117) mengidentifikasikan evaluasi sebagai proses pengukuran dan pembagian hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Lebih lanjut dijelaskan oleh

siagian bahwa yang perlu diperhatikan dalam evaluasi (penilaian) yaitu:

1. Bahwa penilaian adalah fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penelitian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penelitian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya di capai.

Evaluasi menurut Al-Amin (2006;10) merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program kerja atau kegiatan sesuai sasaran pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan evaluasi kebijakan yang merupakan satu tahap penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilaksanakan setelah kebijakan politik tersebut di implementasikan. Hal ini dimaksudkan agar menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan, keefisienannya.

Mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini merupakan langkah penting dalam proses analisis kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperbaiki atau

dirubah (Suhartono,2008:113).

Selanjutnya Badjuri dan Yuwono, (2003-132) evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk tiga tujuan utama yaitu;

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikannya.
3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Kebijakan politik menurut Cochran (dalam Nogi,2003;119) adalah sebagai sebuah perilaku sengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan isu perhatian publik. Dari sebuah perspektif empiris, kebijakan mewujudkan dirinya dalam undang-undang, petunjuk dan program sebagaimana juga didalam rutinitas dan praktek organisasi publik.

Adanya evaluasi pelaksanaan akan dapat mengukur apakah kebijakan yang diambil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut untuk itu perlu dikaji bagaimana kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah;

1. Untuk mengetahui taraf kesiapan dari pada kariawan atau

pegawai untuk melaksanakan tugas kerja.

2. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas yang lain atau kita harus mengulanginya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah di capai proses bekerja yang diharapkan atau belum.
4. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.
5. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan

4. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah salah satu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Dunn memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal) pemberian angka (raiting) dan penilaian (assesment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilailly. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai hasil atau manfaat kebijakan “(Dunn,2003:608).

Dalam Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi

evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Duun menggambarkan kriteria-kriteria kebijakan evaluasi kebijakan yang meliputi enam tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) berkenaan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil di

- dsistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
 6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah;

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik naik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

5. Program Kampung Iklim menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim

1. Pengertian Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

2. Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

a. Pengertian Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Berikut disampaikan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya adaptasi perubahan iklim.

1. Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor

Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemanenan air hujan
- b. Pembuatan dam penahan
- c. Bendungan
- d. Embung
- e. Penampungan air hujan (PAH)

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

- a. Sistem pola tanam dan sistem irigasi
- b. Praktik pertanian terpadu (*integrated farming/mix*)

farming)

- c. Diversifikasi tanaman pangan
 - d. Sistem dan teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan
 - e. Teknologi pemuliaan tanaman
 - f. Pemanfaatan lahan pekarangan (pengembangan kawasan rumah pangan lestari)
 - g. Kegiatan-kegiatan Lain yang Terkait dengan Upaya Peningkatan Penyesuaian Diri Terhadap Perubahan Iklim
3. Pengendalian Penyakit Terkait Iklim
- a. Pengendalian vektor
 - b. Sistem kewaspadaan dini terkait penyakit
 - c. Sanitasi dan air bersih
 - d. Pola hidup bersih dan sehat (*PHBS*)
- b. Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Berikut disampaikan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

1. Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair

Berikut tata cara pengelolaan sampah , limbah padat dan cair

a. Pewadahan dan Pengumpulan

Tahapan pewadahan dan pengumpulan yang dapat dilakukan antara lain :

- Memiliki tempat sampah
- Tidak membuang sampah ke sungai atau lingkungan lain
- Melakukan kegiatan pemilihan sampah
- Memiliki TPS

b. Pengolahan

Tahapan pengolahan yang dapat dilakukan adalah :

- Tidak melakukan pembakaran sampah
- Memiliki fasilitas pengolahan sampah

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan dengan cara melakukan 3R – *Reduce, Reuse, and Recycle* (untuk mengurangi sampah dan limbah padat penyebab emisi GRK, mengurangi jumlah penggunaan barang baru, dan untuk memanfaatkan/ memperpanjang masa pakai barang).

2. Penanganan Lahan Pertanian Rendah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- a. Pengurangan pupuk dan pestisida kimia
 - b. Sistem pola tanaman dan sistem irigasi
 - c. Kegiatan pasca-panen
3. Peningkatan dan/atau Mempertahankan Tutupan Vegetasi
- Bentuk kegiatan tindakan vegetatif :
- a. Penanaman rumput
 - b. Penanaman pohon
 - c. Penanaman semak
 - d. Budidaya tanaman lorong (*alley cropping*)
 - e. Wanatani/ *agroforestry*
 - f. Konservasi daerah pesisir
4. Penanganan/ Antisipasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
- a. Pemberdayaan SDM
 - b. Sistem penanggulangan kebakaran hutan
 - c. Sistem pembukaan lahan
 - d. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan
- c. Kelembagaan dan Dukungan Berkelanjutan
- d. Kelembagaan Masyarakat
 - e. Dukungan Kebijakan
 - f. Dinamika Masyarakat
 - g. Kapasitas Masyarakat

- h. Keterlibatan Pemerintah
- i. Manfaat Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. I Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Nabiila Yumna Gina	Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak	Penelitian menunjukkan PROKLIM telah dilakukan di Kota Surakarta dengan optimal dan baik.
2	Azika Putri Aidila	Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Metode deskriptif kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung iklim di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis belum berjalan optimal.
3	Siti Fajria	Kontribusi Pogram Kampung Iklim (Proklam) Untuk Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) : Studi Kasus Provinsi Jawa Barat	Metode penelitian Kuantitatif	Hampir semua kegiatan program kampung iklim di Provinsi Jawa Barat berkontribusi positif terhadap kehidupan sehat dan sejahtera dan berjalan cukup optimal.

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahuu yaitu sama-sama meneliti tentang Program Kampung Iklim. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian, masalah atau fenomena yang terjadi, serta hasil penelitian yang ada di setiap penelitian berbeda.

C. Kerangka Pikir

Gambar II. I Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kecamatan Balai Jaya



D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisis, maka penulis akan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Evaluasi.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn, (2003:609-611), mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat

menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyambung pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

E. Operasional Variabel

Tabel II. II Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi Kegiatan Pencegahan Dampak Perubahan Iklim Kecamatan Balai Jaya

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai	Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim	1. Upaya Adaptasi	a. Pengendalian Kekeringan, banjir dan tanah longsor b. Peningkatan Ketahanan Pangan c. Pengendalian penyakit terkait iklim

<p>Jaya, Kabupaten Rokan Hilir.</p>	<p>2. Mitigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah, limbah, padat dan cair b. Penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca c. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan <ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan b. Keberadaan dukungan kebijakan c. Tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender d. Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim
	<p>3. Dukungan</p>	

		<p>e. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya</p> <p>f. Pengembangan kegiatan ProKlim</p> <p>g. Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan resiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p>
--	--	---

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Dalam memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam buku Sugiono (2016:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositiveme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Filsafat postpositiveme disebut sebagai paradigma interpretif, konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dan penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah.

Meolong Lexy (2007:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih lokasi di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Desa Balam Jaya dan kelurahan Balai Jaya. Alasan penulis memilih lokasi ini karena dari 9 desa dan 2 kelurahan desa yang ada di Kecamatan Balai Jaya dan setingkat provinsi di Riau wilayah ini satu-satunya desa dan kelurahan yang yang melaksanakan Program Kampung Iklim .

C. Informan dan Key Informan

Informan Penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaanya diteliti (Sukandarumidi 2002:65). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya.

Key Informan adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Burhan Bugin 2007:77)

Dalam hal ini yang menjadi key informan adalah semua orang yang berhubungan dengan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya, yaitu :

Tabel III. I Anggota yang menjadi informan di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

No.	Nama	Jabatan
1	Anang Wahyu Wibowo	Pembina
2	Mahadi Noer	Pelindung
3	Muliyadi	Penasehat
4	Tonny Indramawan	Ketua
5	Adelina	Warga Masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiono 2012:54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan

penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informan yang baik penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pola Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data dokumentasi hubungannya dengan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sudaryono (2018:205) teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Untuk memperoleh data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam, proses kerja, dan menggunakan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau kelompok. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan beberapa panitia Pelaksana Program Kampung Iklim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa data tentang Proklamasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah model interaktif Miles dan Huberman. Analisis interaktif ini merupakan siklus dan interaktif. Artinya peneliti dalam melakukan penelitian bergerak pada empat sumbu yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat berulang dan berlanjut hingga selesai (dalam Sugiono 2012:91). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 4 proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari

kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema.

3. Display atau penyajian data

Display/ penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna kata yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran

keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil inti sarinya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Balai Jaya

Asal mula kata Balai Jaya diambil dari kata Dusun Tanjung Balai Desa Bagan Sinembah Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis pada saat itu, dan saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan dengan Kepenghuluan Lubuk Jawi dan sebagian lainnya masuk wilayah Kecamatan Bagan Sinembah Raya karena Bagan Sinembah tempat suluk Tariqot Naksabandiah Tuan Guru KH.H. Muhammad Kholdun Alm saat ini, merupakan sentral komunikasi dan transportasi melalui sungai pada saat itu sekitar tahun 1970 an.

Dan pada tanggal 19 September 1987 berdirilah Desa Balai Jaya, dengan Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat Kubu H. Naskari, BA yaitu H. Wan Muchtar Noor. Pada tahun 1992 pemilihan pertama kali diadakan di Desa Balai Jaya dengan calon :

1. H. Zainal Abidin
2. H. Wan Muchtar Noor

Dan yang terpilih adalah H. Wan Muchtar Noor dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2016.

Pada tahun 1993 usulan pemekaran kecamatan pertama kali diajukan oleh Penghulu Balai Jaya yaitu H. Wan Muchtar Noor kepada Bapak H. Suyatno yang pada masa itu masih menjabat sebagai Camat

Bagan Sinembah, dengan nama Kecamatan Tanjung Balai Jaya.

Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 diresmikan menjadi Kecamatan dengan nama Balai Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 Tentang Pemekaran Kecamatan yang terdiri dari 9 kepenghuluan 2 kelurahan yaitu Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Balam Jaya, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kepenghuluan Kencana, Kepenghuluan Lubuk Jawi, kepenghuluan Bagan Bhakti, Kelurahan Balai Jaya Kota dan Kelurahan Balam Sempurna Kota.

Kecamatan Balai Jaya memiliki batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
2. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat Berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
4. Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Bangko Pusako.

B. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Balai Jaya

1. Jumlah Penduduk

Gambaran umum pemerintahan kecamatan Balai Jaya berikut ini akan dipaparkan mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

Tabel IV. I Jumlah Penduduk Kecamatan Balai Jaya

No.	Kelompok Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa
1	Laki-laki	25.941
2	Perempuan	24.714
	Jumlah	50.656

Sumber: Kantor Camat Balai Jaya,2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Balai Jaya penduduk yang mendominasi adalah laki-laki. Potensi yang menonjol di Kecamatan Balai Jaya adalah pertanian, perdagangan dan perkebunan.

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Kecamatan Balai Jaya bermata pencaharian sebagian besar bekerja sebagai Petani, Pengusaha, Buruh, Pedagang, Pengangkutan, PNS Dan Peternak. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. II Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Balai Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	3.760 kk
2	Pengusaha/ Pedagang	133 kk
3	Buruh	9.343 kk
5	Pengangkutan	224 kk
6	Pegawai Negeri Sipil	136 kk
7	Peternak	397 kk
	Jumlah	13.993 kk

Sumber : Kantor Camat Balai Jaya, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Kecamatan Balai Jaya adalah buruh dan kedua petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir cukup sejahtera.

3. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Balai Jaya memiliki tingkat pendidikan yang heterogen (campuran). Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda.

Tabel IV. III Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Balai Jaya

No.	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Masyarakat
1	TK	901
2	SD/Sederajat	3.728
3	SLTP/Sederajat	1.041
4	SLTA/Sederajat	1.318
5	Diploma I/II	65
6	Diploma III/Akademi	97
7	Strata I	120
8	Strata II	5
9	Strata III	0
Jumlah		7.276

Sumber : Kantor Camat Balai Jaya, 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Balai Jaya terbanyak tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu sebanyak 3.728 orang dan yang sedikit tingkat pendidikan S II yaitu sebanyak 5 orang.

4. Sarana Dan Prasarana

Selanjutnya akan dipaparkan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balai Jaya sebagai berikut :

Tabel IV. IV Sarana dan Prasarana Kecamatan Balai Jaya

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa/Kepenghuluan	11	Layak Pakai
2	Bank	1	Layak Pakai
3	Kantor Koperasi	14	Layak Pakai
4	Sekolah	53	Layak Pakai
5	Puskesmas	1	Layak Pakai
6	Posyandu	11	Layak Pakai
7	Masjid	50	Layak Pakai
8	Mushola	60	Layak Pakai
9	Gereja	22	Layak Pakai
10	Kuil/Pura	1	Layak Pakai
11	Pasar Umum	5	Layak Pakai
	Jumlah	229	Layak Pakai

Sumber : Kantor Camat Balai Jaya,2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa sarana dan prasarana

yang ada di Kecamatan Balai Jaya sudah bisa dikatakan memadai dan layak pakai.

C. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya

Gambar IV. 1 Struktur Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Tim Pelaksana ProKlim Kecamatan Balai Jaya, 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Data tentang identitas informan menyangkut tentang kelompok umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang di sebarakan kepada 5 orang responden yaitu Pembina Program Kampung Iklim, Pelindung, Penasehat, Ketua dan Warga Masyarakat Kecamatan Balai Jaya.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Keadaan usia responden sangat perlu diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel V. I Identitas Infoman Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	0 orang	0
2	31-40	3 orang	77 %
3	41-50	2 orang	23 %
Jumlah		5 orang	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel V.I diatas dapat diketahui identitas imforman berdasarkan umur adalah dari 6 orang yang dijadikan

sebagai informan sebanyak 3 orang atau 77 % berumur 31-40 tahun, sebanyak 33 % atau 2 orang berumur 41-50 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan didominasi berdasarkan umur 31-40 tahun.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan menjelaskan jenis kelamin responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini :

Tabel V. II Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4 orang	83 %
2	Perempuan	1 orang	17 %
Jumlah		6 orang	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.II diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin adalah 5 orang yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 4 orang atau 83 % berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1 orang atau 17 % berjenis kelamin perempuan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas

informan berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki.

3. Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting karena dapat menciptakan keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tinggi rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi sikap dan pola pikir seseorang terutama ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V. III Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA/Sederajat	0	0
2	Strata I	5	100 %
Jumlah		5 orang	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.III diatas dapat diketahui identitas informan strata berdasarkan jenjang pendidikan adalah 6 orgng yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 6 orang atau 100 % berjenjang pendidikan strata 1. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenjang pendidikan semuanya di dominasi oleh tingkat strata 1 sebanyak 6 orang atau 100 %.

4. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai

macam kebutuhan hidupnya. Berikut adalah pekerjaan informan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V. IV Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Atasan Manager	1	17 %
2	Manager	1	17 %
3	Staf	2	49 %
4	Guru	1	17 %
	Jumlah	5 orang	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan V.IV diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan pekerjaan adalah dari 5 orang yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 1 orang atau 17 % sebagai Atasan Manager, sebanyak 1 orang atau 17 % sebagai Manager, sebanyak 2 orang atau 49 % sebagai Staf dan sebanyak 1 orang atau 17 % sebagai Guru. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh staf sebanyak 2 orang atau 49 %.

B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Pada bagaian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim yang termasuk kedalam ruang lingkup tata laksana ProKlim yang terdiri dari upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir .

1. Indikator Upaya Adaptasi

a. Pengendalian Banjir, Kekeringan dan Tanah Longsor

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam upaya pengendalian banjir, kekeringan dan tanah longsor meliputi Pemanenan air hujan, Pembuatan dam penahan, Bendungan, Embung, Penampungan air hujan (PAH).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator upaya adaptasi evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Anang Wahyu Wibowo (Pembina) di kecamatan Balai Jaya yang mengatakan:

“Dengan adanya Program Kampung iklim ini sangat membantu sekali pada saat musim perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan terutama kekeringan diwilayah ini, semenjak melaksanakan ProKlim, kekeringan sudah sangat berkurang karena ada program pelestarian air dimana kita memanen air hujan pada saat musim hujan air , membuat minimal 10 biopori disetiap rumah untuk meresapkan air, ada sumur resapan , kemudian pemanfaatan air limbah rumah tangga yang disaring melalui saluran pembuangan air/SPA yang dialirkan kekolam berisi ikan dan air

kolam tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman, jadi hampir tidak ada air yang terbuang dalam kegiatan pemanenan air hujan ini.” (Anang Wahyu Wibowo, Pembina ProKlim Kecamatan Balai Jaya, 5 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa upaya adaptasi evaluasi pelaksanaan proklam di kecamatan balai jaya telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi akibat dari musim perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir dan telah merasakan manfaat dan perubahan yang baik dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pelindung pelaksana program kampung iklim kecamatan balai jaya yang mengatakan :

“Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat banjir, kekeringan dan tanah longsor ini kami melakukan beberapa kegiatan yang ada didalam ProKlim seperti sistem pemanenan air hujan, membuat resapan air, pengelolaan mata air agar hemat dan tidak membuang air yang bisa dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan lain, dan tentunya dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan untuk pengendalian banjir kekeringan dan tanah longsor ini”. (Mahadi Noer, Pelindung ProKlim 16 Juli 2020 10:26 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas upaya adaptasi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam mengurangi akibat dari perubahan iklim yang terjadi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Penasehat dan Ketua Pelaksana Program Kampung Iklim

Kecamatan Balai Jaya yang mengatakan :

“Awal dari dilaksanakannya Program Kampung Iklim diwilayah ini yaitu karena adanya Sekolah Adiwiyata berwawasan Lingkungan yang dimana manfaat yang dirasakan dari kegiatan berwawasan lingkungan ini sangatlah positif, maka dari sini lah kegiatan dari Program Kampung Iklim dimulai termasuklah didalam kegiatan ProKlim ini terdapat upaya yang dapat mengurangi faktor perubahan iklim akibat dari faktor perubahan iklim yang terjadi. Maka dilakukanlah upaya dengan tahapan-tahapan kemudian kegiatan pengendalian untuk mengurangi banjir, kekeringan dan tanah longsor ini dilakukan yaitu, dengan membuat resapan air yang meliputi kolam limbah rumah tangga, rorak, biopori, dan sumur resapan air. Selain itu ada kegiatan pemanenan air hujan, dan yang pasti dengan menjaga lingkungan serta hemat dalam menggunakan air dan hasil yang dirasakan masyarakat dan saya sendiri alhamdulillah sangat baik”. (Mulyadi dan Tonny Indramawan, Penasehat dan Ketua 5 Agustus 2020 11:50).

Berdasarkan ungkapan diatas evaluasi pelaksanaan proklm diawali dengan adanya kegiatan sekolah berwawasan lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat dari perubahan iklim yang terjadi sehingga kegiatan uapaya adaptasi dilakukan diwilayah tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga masyarakat pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Selaku warga yang menjalankan kegiatan Proklm upaya yang dilakukan untuk pengendalian banjir,kekeringan dan tanah longsor adalah dengan kami membuat talang air, kolam, biopori di pekarangan rumah , dan juga pastinya kegiatan ini difasilitasi dan dibimbing oleh atasan kami dari perusahaan dan pemerintah serta Dinas Lingkungan Hidup, dan hasil dari kegiatan yang kami lakukan juga sangat kami rasakan manfaatnya dengan baik sudah tidak pernah merasakan kekurangan air pada saat musim kemarau, kesediaan air bersih juga sudah tercukupi untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari”. (Adelina, Masyarakat 10 Agustus 2020 09:17 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas upaya adaptasi pelaksanaan

program kampung iklim sudah dilakukan oleh warga masyarakat dan dirasakan baik manfaatnya oleh warga masyarakat setempat.

b. Peningkatan Ketahanan Pangan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam upaya peningkatan ketahanan pangan meliputi Sistem pola tanam dan sistem irigasi Praktik pertanian terpadu (*integrated farming/mix farming*), Diversifikasi tanaman pangan, Sistem dan teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan, Teknologi pemuliaan tanaman, Pemanfaatan lahan pekarangan (pengembangan kawasan rumah pangan lestari), dan Kegiatan-kegiatan Lain yang Terkait dengan Upaya Peningkatan Penyesuaian Diri Terhadap Perububahan Iklim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator upaya adaptasi evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Tonny Indramawan (Ketua Pelaksana ProKlim) di kecamatan Balai Jaya yang mengatakan :

“Kalau kegiatan ketahanan pangan di wilayah ini ada membuat irigasi penahan air, kemudian ada pola tanam heterokultur di sekitar pekarangan rumah, dan beberapa ternak yang dilakukan seperti ternak ikan, ternak unggas, ternak kambing, dan ternak lembu”. (*Tonny Indramawan, 05 Agustus 2020 11:50 WIB*).

Berdasarkan ungkapan diatas diketahui bahwa upaya adaptasi pengendalian ketahanan pangan dalam Pelaksanaan

Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya telah dilakukan dengan membuat irigasi penahan air, pola tanam heterokultur yang memanfaatkan pekarangan rumah, dan melaksanakan berbagai ternak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga masyarakat pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Kalau untuk ketahanan pangan kami banyak melakukan kegiatan seperti tanam menanam sayur-sayuran dan kebutuhan dapur lainnya seperti contohnya kangkung, cabai, kunyit, kencur dan masih banyak lagi. Tetapi kadang kami sedikit terkendala diwaktu, pekarangan rumah kami yang sempit sehingga sedikit susah untuk melakukan kegiatan tersebut namun, masih tetap kami lakukan setelah kami pulang kerja demi terpenuhinya kegiatan dan kebutuhan kami sehari-hari.” (Adelina, 10 Agustus 2020 09:17 WIB).

Berdasarkan ungakapan diatas diketahui bahwa upaya ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah baik, namun ada kendala seperti kurangnya tempat yang luas untuk sistem pola tanam dan waktu yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian ketahanan pangan tersebut.

c. Pengendalian Penyakit terkait Iklim

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam upaya pengendalian penyakit terkait iklim meliputi Pengendalian vektor, Sistem kewaspadaan dini terkait penyakit, Sanitasi dan air bersih, dan Pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator upaya adaptasi evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Anang Wahyu Wibowo yang mengatakan :

“Ya kalau kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim dengan dilaksanakannya Program kampung iklim ini ingin menjadikan lingkungan sehat dan nyaman sehingga dapat mengurangi bahaya penyakit akibat perubahan iklim salah satunya dengan melakukan kegiatan namanya pengendalian vektor dimana kegiatan ini dengan menjaga dan memperbaiki lingkungan untuk mencegah adanya genangan air yang mengakibatkan terkumpulnya sarang nyamuk yang dapat mengakibatkan adanya penyakit demam berdarah dan lain lain.” (Anang Wahyu Wibowo, 5 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa upaya adaptasi pengendalian penyakit dalam pelaksanaan program kampung iklim telah melaksanakan salah satu kegiatan pengendalian yaitu pengendalian vektor untuk mencegah penyakit demam berdarah akibat dari perubahan iklim. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pelindung pelaksana program kampung iklim kecamatan bakai jaya yang mengatakan :

“Upaya yang dilakukan di daerah ini dalam pengendalian penyakit akibat perubahan iklim ini adalah dengan pengendalian vektor, jumentik atau juru pemantau jentik dengan begitu nyamuk akan terkumpul dan mengurangi bahaya penyakit akibat perubahan iklim yang terjadi.” (Mahadi Noer, 16 Juli 2020 10:26 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengendalian penyakit akibat perubahan iklim telah dilakukan pengendalian vektor dengan kegiatan jumentik yaitu juru pemantau jentik untuk mengurangi

dampak penyakit dari perubahan iklim.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan penasehat dan ketua pelaksana program kampung iklim kecamatan balai jaya yang mengatakan :

“Upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian penyakit akibat perubahan iklim disini yaitu dengan melaksanakan yang pertama pengendalian vektor yang didalamnya harus melakukan 3 M (menguras, menutup dan menimbun genangan air), kemudian ada juga kegiatan jumantik (juru pemantau jentik), kemudian sanitasi air bersih dilakukan dengan cara memiliki rumah sehat, bersih dan asri dan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari hari, kegiatan ini lah yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit akibat perubahan iklim diwilayah ini”. (Mulyadi dan Tonny Indramawan 05 Agustus 2020 11:50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas diketahui bahwa upaya pengendalian penyakit akibat perubahan iklim di kecamatan balai jaya sudah melakukan kegiatan vektor dengan cara 3 M dan sanitasi air bersih dengan cara menjaga lingkungan yang bersih dan menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-sehari.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga masyarakat pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Yang kami lakukan dengan mengikuti arahan saja yang baik untuk kami kedepannya yaitu kami melakukan kebersihan lingkungan rumah terutama agar terjaganya lingkungan dari nyamuk, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong setiap minggu untu membersihkan lingkungan sekitar, menguras dan menimbun genangan air, kemudian kami juga melakukan juru pemantau nyamuk disekitar tempat penampungan air dan sekarang lingkungan terasa lebih nyaman dan bersih dan pastinya jauh dari banyaknya nyamuk dibandingkan sebelum dilakukannya kegiatan ini”. (Adelina, 10 Agustus 2020 09:17 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas diketahui bahwa upaya pengendalian penyakit oleh masyarakat sudah dilakukan dan lingkungan lebih baik dibandingkan sebelumnya dilakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator upaya adaptasi pelaksanaan program kampung iklim, penulis menyimpulkan bahwa dari upaya adaptasi sudah cukup efektif, mengenai pengendalian banjir, kekeringan dan tanah longsor di kecamatan balai jaya sudah berkurang sangat pesat akibat dari adanya kegiatan Proklamasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kegiatan pengendalian ketahanan pangan di wilayah kecamatan balai jaya juga sudah dilakukan namun masyarakat mengeluh beberapa kendala yang mereka hadapi dalam melakukan kegiatan tersebut dan terakhir pengendalian penyakit akibat perubahan iklim sudah melaksanakan kegiatan pengurangan dampak penyakit akibat perubahan iklim dan kegiatan dilaksanakan dengan cukup baik. Kondisi ini akan semakin baik apabila pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan dengan berkelanjutan.

2. Indikator Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

a. Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam mitigasi perubahan iklim pengelolaan sampah, limbah padat dan cair meliputi pewadahan dan pengumpulan, tahapan pewadahan dan pengumpulan yang dapat dilakukan yaitu memiliki tempat sampah, tidak membuang sampah ke sungai atau lingkungan lain, melakukan kegiatan pemilihan sampah, memiliki TPS (tempat pembuangan sampah). Kemudian pengolahan, tahapan pengolahan yang dapat dilakukan adalah tidak melakukan pembakaran sampah, memiliki fasilitas pengolahan sampah. Selanjutnya pemanfaatan, dengan cara melakukan 3R – *Reduce, Reuse, and Recycle* (untuk mengurangi sampah dan limbah padat penyebab emisi GRK, mengurangi jumlah penggunaan barang baru, dan untuk memanfaatkan/memperpanjang masa pakai barang).

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator mitigasi perubahan iklim dalam evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Anang Wahyu Wibowo (Pembina) yang mengatakan :

“Awalnya selokan di sekitar rumah bau dan kotor semenjak dilaksanakannya salah satu kegiatan dari ProKlim yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah Kecil (IPAL) sekarang sudah tidak bau dan kotor lagi bahkan bisa digunakan untuk air kolam berisi ikan dan menyirami tanaman”. (Anang Wahyu Wibowo, 05 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi

pengelolaan sampah, limbah padat dan cair diwilayah kecamatan balai jaya telah melakukan kegiatan penyaringan air limbah kecil seperti air sisa rumah tangga yang dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pelindung pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Kalau pengelolaan sampah, limbah padat dan cair dilakukan dengan melakukan semacam daur ulang sampah organik dan anorganik dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya.” (Mahadi Noer 16 Juli 2020 10:26 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa mitigasi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair di kecamatan Balai Jaya hanya dengan kegiatan mendaur ulang sampah organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Jadi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair diwilayah ini dengan kami melaksanakan kegiatan pewadahan dan pengumpulan, kegiatan ini sebagai upaya mencegah pembusukan sampah yang tidak pada tempatnya seperti sampah rumah tangga ataupun lainnya, sampah ini nantinya bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Kemudian pemanfaatan sampah anorganik melalui 3R – Reduce, Reuse, and Recycle untuk mengurangi sampah dan limbah padat, tapi kegiatan ini tentunya harus dilakukan dengan kesadaran masyarakat juga karena saat ini kegiatan menjaga lingkungan sangat penting dilakukan untuk pola hidup kita yang sehat.” (Tonny Indramawan, 05 Agustus 2020 11:50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa mitigasi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair program kampung iklim sudah dilakukan dengan melakukan 3R dan dengan

melakukan pewadahan dan pengumpulan untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan , tapi kegiatan tersebut sepertinya masih kurang maksimal karena kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga masyarakat pelaksana program kampung iklim di kecamatan Balai Jaya yang mengatakan :

“Kami banyak mendaur ulang sampah organik dan anorganik menjadi barang dan bahan yang bisa kami manfaatkan kembali , contohnya seperti kerajinan tangan yang kami lakukan hasil dari pengolahan barang-barang bekas yang biasa dibuang sekarang bisa kami olah dan digunakan untuk kebutuhan, tapi ya untuk melakukan kegiatan daur ulang kami juga membutuhkan biaya untuk membeli beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan kami melakukan iuran sendiri agar lebih ringan”. (Adelina, 10 Agustus 2020 09:17 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair sudah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan daur ulang dan sudah merasakan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian kegiatan tersebut menggunakan uang dari iuran mandiri untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan.

b. Penanganan Lahan Pertanian Rendah Emisi Gas Rumah Kaca

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam mitigasi perubahan iklim penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca meliputi,

pengurangan pupuk dan pestisida kimia, sistem pola tanaman dan sistem irigasi, dan kegiatan pasca-panen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator mitigasi perubahan iklim dalam evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan ketua pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Kegiatan yang dilakukan salah satunya penggunaan pupuk dari olahan sendiri seperti menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk dan mengurangi penggunaan petisida kimia contohnya seperti pupuk kompos dan pupuk kandang”.(Tonny Indramawan, 05 Agustus 2020 11:50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca di kecamatan Balai Jaya telah melakukan kegiatan pengurangan pupuk kimia dan menggunakan pupuk bahan organik hasil olahan sendiri oleh masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan warga masyarakat pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Jadi seperti sisa kotoran ternak kami olah menjadi pupuk kandang dan sampah organik diolah menjadi pupuk kompos tanaman pun menjadi lebih subur dibandingkan sebelumnya”. (Adelina, 10 Agustus 2020 09:17).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca di Kecamatan Balai Jaya dengan melakukan kegiatan

mengolah sisa kotoran ternak dan sampah organik menjadi pupuk untuk mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia.

c. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam mitigasi perubahan iklim peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi meliputi, bentuk kegiatan tindakan vegetatif yaitu, penanaman rumput, penanaman pohon, penanaman semak, budidaya tanaman lorong (*alley cropping*), wanatani/ *agroforestry*, konservasi daerah pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator mitigasi perubahan iklim peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi dalam evaluasi pelaksanaan program kampung iklim, berikut adalah petikan wawancara dengan ketua pelaksana program kampung iklim yaitu bapak Tonny Indramawan yang mengatakan:

“untuk kegiatan ini masih belum maksimal dilakukan karena kurangnya lahan jadi hanya melakukan kegiatan pola tanam heterokultur dan tanaman pangan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri”. (Tonny Indramawan, 05 Agustus 11:50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya lahan untuk dijadikan tempat kegiatan tersebut dilaksanakan.

d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dalam mitigasi perubahan iklim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sistem penanggulangan kebakaran hutan, sistem pembukaan lahan, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator mitigasi perubahan iklim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan , berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Anag Wahyu Wibowo Pembina Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kecamatan Balai Jaya yang mengatakan :

“Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan disini ada team damkarnya. Dalam satu kebun rata-rata dua regu yang terdiri dari 15 orang. Peralatannya ada yang manual seperti gepyok,cangkul, babat dan lain-lain. Kalau kebakaran dalam skala besar kita ada mobil pemadam kebakaran dan mesin pompa yang besar. Kemudian ada menara pantau api lengkap dengan petugasnya,ada juga embung untuk menyediakan air. Ecara ringkasnya seperti itu kegiatan pencegahan dan penaggulangan yang kami lakukan.” (Anag Wahyu Wibowo, 05 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah disediakanya tim pemadaam kebakaran disetiap wilayah dimana satu tim terdiri dari 15 orang dan dengan

perlengkapan yang cukup lengkap. Selain itu, dibuat juga menara pemantau api dengan petugasnya, kemudian untuk kebakaran dalam skla besar telah disediakan mobil kebakaran dan alat pompa air yang besar serta embung.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua pelaksana program kampung iklim kecamatan balai jaya yang mengatatakan :

“untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan disini kami membuat alat peringatan dini (Early Warning Sistem), kemudian ada damkar dari setiap wilayah perkebunan yang terdiri dari beberpa regu atau kelompok.” (Tonny Indramawan, 05 Agustus 2020 11:50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dikecamatan balai jaya telah membuat alat peringat dini yang digunakan untuk apabila kebakaran terjadi, kemudian dibentuknya kelompok damkar disetiap wilayah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai mitigasi perubahan iklim dalam evaluasi pelaksanaan program kampung iklim dikecamatan balai jaya sudah cukup efektif dan sudah melakukakan serangkaian kegiatan dan program untuk mencegah dan mengurangi dampak dari perubahan ikli. Namun, dari semua kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari kendala. Program-program yang dilakukan juga masih ada yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam aturan yang ditetapkan.

Kondisi ini bisa sangat baik apabila kegiatan dilakukan dengan berkelanjutan dan maksimal.

3. Indikator Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dalam Pelaksanaan Program kampung Iklim meliputi, kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan, dinamika masyarakat, kapasitas masyarakat, keterlibatan pemerintah, manfaat kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim ini diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah, kelompok masyarakat lain, organisasi eksternal dan perlu adanya bukti kegiatan yang dilakukan. Karena dengan begitu program-program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan dirasakan manfaatnya dengan baik oleh banyak orang dan bisa menjadi panutan untuk daerah lain yang belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Kampung Iklim.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang didasarkan pada indikator kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim, berikut adalah petikan wawancaa dengan Bapak Anang Wahyu Wibowo (pembina) yang mengatakan :

"Program ini didukung dan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten dengan memberikan uang senilai 8 juta, tapi uang tersebut adalah bentuk apresiasi atau penghargaan dari Tropi yang didapat, jadi disini Perusahaan Perkebunan yang banyak membiayai kegiatan-kegiatan ProKlim, pembinaan disupport dari kecamatan tapi tidak maksimal. Jadi ya tidak heran kalau masyarakat diluar perusahaan tidak melaksanakan ProKlim karena membutuhkan dukungan biaya yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ProKlim ini, kemudian kesadaran masyarakat diluar sana juga belum terbuka dan berpikir bahwa kegiatan ini hanya sebagai ajang perlombaan saja. Maka dari itu kegiatan disini harus disertai dengan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk meletakkan produk-produk yang dihasilkan dari ProKlim ini sehingga dapat menjadi nilai jual dan menjadi bagian dari manfaat ekonomi bagi masyarakat, nah manfaat ekonomi ini sangat dirasakan bagi masyarakat karena bisa menghemat dan bisa belanja dirumah sendiri, disitu ada sayur mayur, ada ternak dan lain-lain, selain itu mereka juga bisa menjual hasil tanaman tersebut kepada konsumen. Kemudian ada juga manfaat lingkungan, dimana dalam menjalankan ProKlim ini lingkungan menjadi sehat dan nyaman, dan dari segi musim juga mempengaruhi yang dulunya sering mengalami banjir dan kekeringan sekarang sudah sangat berkurang karena adanya ProKlim ini. Tapi ada keinginan yang belum tercapai hingga saat ini, karena ini adalah program pemerintah dan kami ini adalah masyarakat perkebunan atau perusahaan maka sangat besar harapan kesadaran masyarakat desa diluar perusahaan juga bisa melaksanakan program ini dengan bekerja sama dengan kami karena manfaat nya juga baik untuk kita sendiri". (Anang Wahyu Wibowo 05 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa kelembagaan dan dukungan keberlanjutan pelaksanaan program kampung iklim mendapat dukungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten hanya berupa uang senilai delapan juta rupiah, itupun hanya untuk bentuk apresiasi atau penghargaan bukan untuk biaya kegiatan-kegiatan program kampung iklim, dukungan dari kecamatan kecamatan kurang maksimal dilakukan, perusahaan lah yang besar membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan program kampung iklim karena kegiatan tersebut dilaksanakan diwilayah perusahaan. Namun walaupun begitu, manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat sangatlah baik , baik dalam segi manfaat ekonomi maupun lingkungan. Bahkan masyarakat yang juga berharap program kampung iklim ini bisa dilakukan juga oleh masyarakat daerah lainnya dengan bekerja sama dengan perusahaan agar menjadi daerah yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua pelaksana program kampung iklim yang mengatakan :

“Program kampung iklim ini kan tidak spontan dilakukan yang awalnya harus sosialisasi dahulu ke kawan-kawan atau kemasyarakat dan bekerja sama dengan aparat dusun karena ProKlim ini sebenarnya adalah atas nama Dusun bukan perusahaan, kemudian pembinaan dari kecamatan dan dibantu besar oleh perusahaan, ada juga dukungan dari kelompok tani, kemudian dibina dan didukung oleh dinas lingkungan hidup kabupaten rokan hilir dan dinas lingkungan hidup provinsi Riau dalam bentuk anggaran apresiasi atau penghargaan terhadap daerah pelaksana ProKlim. Disini kami juga ada membentuk kelompok masyarakat seperti kelompok tani wanita maju dimana yang bekerja dalam kegiatan ini adalah para ibu-ibu rumah tangga dan juga kelompok remaja peduli lingkungan dimana kegiatan ini di laksanakan oleh remaja ata generasi muda yang kami beri wilayah tersendiri untuk mereka melakukan kegiatan ProKlim kemudian dinilai dan dievaluasi jadi kegiatan ini dapat berkembang dan berkelanjutan. Karena, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam segi ekonomi dan lingkungan juga sangat baik, mereka bisa lebih menghemat pengeluaran biaya belanja rumah tangga bahkan bisa menjual produk-produk yang mereka hasilkan dari kegiatan ProKlim ini. Manfaat lingkungannya sendiri juga baik, lingkungan menjadi indah, bersih dan nyaman”.

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa kelembagaan dan dukungan berkelanjutan di kecamatan balai didukung oleh dinas lingkungan hidup kabupaten dan provinsi dalam bentuk anggaran sebagai apresiasi penghargaan daerah pelaksana Program Kampung Iklim. Kemudian dibina oleh kecamatan. Dalam kegiatan tersebut masyarakat

telah membentuk kelompok masyarakat seperti kelompok tani wanita maju dan kelompok remaja peduli lingkungan sebagai bentuk upaya mereka agar ProKlim dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga masyarakat yang melaksanakan program kampung iklim, yang mengatakan :

“Karena dalam program ini saya adalah ketua dari kelompok tani wanita maju, jadi rasa merasakan banyak proses yang terjadi dalam kegiatan program kampung iklim ini , dengan dukungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten dan bantuan perusahaan sangat membantu kami dalam melaksanakan berbagai kegiatan . Selain itu manfaat yang kami rasakan juga sangat baik salah satunya adalah manfaat ekonomi, dimana kami bisa menggunakan dan menjual produk-produk yang kami buat sendiri sehingga pengeluaran kebutuhan kami pun berkurang, kemudian lingkungan disini juga menjadi bersih dan indah.”

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dari program kampung iklim mendapatkan dukungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten dan perusahaan dimana tempat mereka bekerja. Kemudian, mereka juga merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator kelembagaan dan dukungan berkelanjutan Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya sudah mendapat dukungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten akan tetapi masih memerlukan berbagai dukungan dari pihak diluar pemerintah setempat juga agar Program Kampung Iklim ini semakin berkembang dan dapat dilakukan dengan berkelanjutan. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan masyarakat juga dapat diatasi.

Dari hasil penelitian penulis menilai bahwa sistem pembiayaan atau anggaran mandiri adalah menjadi faktor utama mengapa banyak desa dan daerah lain tidak melaksanakan program kampung iklim dan kesadaran masyarakat serta pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program kampung iklim. Penulis menilai masyarakat yang melaksanakan program kampung iklim di daerah ini dapat berjalan dengan cukup maksimal karena adanya dukungan besar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan juga melakukan sosialisasi dengan sistem militer agar masyarakat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.

Peneliti berharap semoga program kampung iklim bisa menyeluruh dilaksanakan di kecamatan Balai Jaya dan mendapatkan perhatian lebih lagi baik dari pihak pemerintah, organisasi eksternal maupun kesadaran masyarakat itu sendiri sehingga lingkungan dapat tetap terjaga dan kehidupan masyarakat dapat maju dan sejahtera.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum penulis menyimpulkan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya, penulis terlebih dahulu kembali melihat teori yang penulis gunakan yaitu teori menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim teori ini mengemukakan ada 3 jenis evaluasi yaitu Upaya Adaptasi, Mitigasi dan Dukungan. Dari ketiga evaluasi ini terdapat item-item yang mana item-item tersebut sebagai salah satu alat bagi penulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Dalam teori menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dikatakan bahwa upaya adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Lalu dalam mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingas GRK dan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya yang penulis lakukan setelah melihat teori, yang menjadi alat pertimbangan selanjutnya bagi penulis untuk menentukan evaluasi ini adalah observasi. Dalam observasi yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang

Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sudah optimal dilakukan walaupun tidak semua daerah melaksanakan program tersebut. Adapun faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (pembina) yang mengatakan :

“Program ini didukung dan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan memberikan uang senilai 8 juta,tapi uang tersebut adalah bentuk apresiasi atau penghargaan dari Tropi yang didapat, jadi disini Perusahaan Perkebunan yang banyak membiayai kegiatan-kegiatan ProKlim, pembinaan disupport dari kecamatan tapi tidak maksimal. Jadi ya tidak heran kalau masyarakat diluar perusahaan tidak melaksanakan ProKlim karena membutuhkan dukungan biaya yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ProKlim ini, kemudian kesadaran masyarakat diluar sana juga belum terbuka dan berpikir bahwa kegiatan ini hanya sebagai ajang perlombaan saja. Maka dari itu kegiatan disini harus disertai dengan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk meletakkan produk-produk yang dihasilkan dari ProKlim ini sehingga dapat menjadi nilai jual dan menjadi bagian dari manfaat ekonomi bagi masyarakat, nah manfaat ekonomi ini sangat dirasakan bagi masyarakat karena bisa menghemat dan bisa belanja dirumah sendiri,disitu ada sayur mayur, ada ternak dan lain-lain, selain itu mereka juga bisa menjual hasil tanaman tersebut kepada konsumen. Kemudian ada juga manfaat lingkungan, dimana dalam menjalankan ProKlim ini lingkungan menjadi sehat dan nyaman, dan dari segi musim juga mempengaruhi yang dulunya sering mengalami banjir dan kekeringan sekarang sudah sangat berkurang karena adanya ProKlim ini. Tapi ada keinginan yang belum tercapai hingga saat ini, karena ini adalah program pemerintah dan kami ini adalah masyarakat perkebunan atau perusahaan maka sangat besar harapan kesadaran masyarakat desa diluar perusahaan juga bisa melaksanakan program ini dengan bekerja sama dengan kami karena manfaat nya juga baik untuk kita sendiri”. (Anang Wahyu Wibowo 05 Agustus 2020 11:07 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa kelembagaan dan dukungan keberlanjutan pelaksanaan program kampung iklim

mendapat dukungan dari dinas lingkungan hidup kabupaten hanya berupa uang senilai delapan juta rupiah, itupun hanya untuk bentuk apresiasi atau penghargaan bukan untuk biaya kegiatan-kegiatan program kampung iklim, dukungan dari kecamatan kecamatan kurang maksimal dilakukan, perusahaan lah yang besar membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan program kampung iklim karena kegiatan tersebut dilaksanakan diwilayah perusahaan.

Dalam melaksanakan program kampung iklim daerah pelaksana harus menyiapkan dana anggaran yang cukup besar melalui iuran rumah tangga atau mandiri untuk biaya kegiatan-kegiatan, karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak banyak dan kesadaran atau partisipasi serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program kampung iklim.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dapat dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Berdasarkan indikator upaya adaptasi perubahan iklim di Kecamatan Balai Jaya sudah melaksanakan program-program sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti adanya program pengendalian kekeringan banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengendalian penyakit terkait iklim. Berdasarkan indikator upaya mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, dan

penanganan/antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

2. Kendala dalam menjalankan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah banyaknya dana anggaran mandiri yang harus disediakan untuk pelaksanaan program kampung iklim dan kesadaran atau partisipasi masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program kampung iklim.

B. Saran

Dalam melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pemerintah setempat harus lebih memberikan sosialisasi lanjutan agar masyarakat dapat memahami apa yang dimaksud dengan program kampung iklim serta manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan tersebut, dan mengenai anggaran mandiri yang diperlukan pemerintah daerah dapat melakukan upaya usulan ke pemerintah pusat agar biaya dapat di turunkan ke masyarakat untuk mendukung berjalannya program kampung iklim yang lebih menyeluruh dan maksimal di Kecamatan Balai Jaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Badjuri, A., & Yuwono, T. 2003. *Pengantar Administratif Pembangunan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hanim, L. 2004. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Jakarta. Konphalindo
- Labolo, Muhaddam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan : suatu kajian teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta, Grafindo
- Lexy, Moelong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya
- Lubis, M. S. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju
- Santoso, P., Hanif, H., & Gustomy, R. 2004. *Menembus Otordoksi. Kajian kebijakan publik*. Fisipol UGM.
- Saydam, G. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (keperintahan yang baik)*. Bandung. Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara

Subarsono, A. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok, PT Raja Grafindo Persada

Sugiono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta

Sugiono, S. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Bandung,

Alfabeta

Sukandarmidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Universitas Gajah

Mada

Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat, Rineka

Cipta

Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka

Cipta

Tangkilisan, Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasino

Jurnal

Awang, Z., Ahmad, J. H., & Zin, N. M. (2010). Modelling job satisfaction and work commitment among lecturers: A case of UiTM Kelantan. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 1(2), 45-59.

Azika Putri Aidila. "Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis". Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas
Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Riau

Ghina, N. Y., & Zunariyah, S. (2017). *Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan*

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. DILEMA, 32(2),
80-
98.

Siti Fajria. 2018. Kontribusi Program Kampung Iklim (Proklim) Untuk Mencapai

Target Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) : Studi Kasus

Provinsi Jawa Barat. Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Intitut Pertanian Bogor

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Internet

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<https://eprints.uny.ac.id/53139/3/BAB%20III%2013413241013.pdf>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+key+informan&ie=utf-8&oe=utf-8>